

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. GOWA**

RAHMAT HIDAYAT

105730442813



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2018

**EFEKTIFITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA PEMERINTAH KAB. GOWA**

**Rahmat Hidayat
105730442813**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektifitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada
Perintah Daerah Kab. Gowa

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat

No. Stambuk/Nim : 105730442813

Fakultas : Ekonomidan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji Skripsi
Strata Satu (S1) pada hari Senin, 12 Februari 2018 pada program studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 13 Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,



Drs. H. Hamzah Limpo, MSI
Nip : 19520717 198003 1 002

Pembimbing II,



Ismail Badollahi, SE, MSi, AK, CA
NBM : 1073428

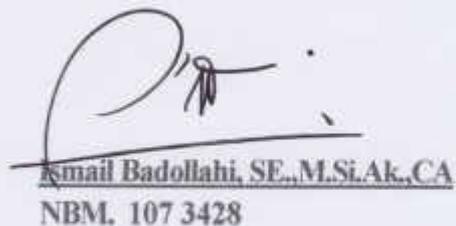
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Basulung, SE., MM
NBM. 903.078

Ketua Jurusan Akuntansi,



Ismail Badollahi, SE., MSi, AK., CA
NBM. 107 3428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Rahmat Hidayat, Nim 105730442813 Ini Telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 17 Tahun 1439 H/2018 M dan telah dipertahankan didepan penguji pada Hari Senin, 12 Februari 2018 M. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Jumadil Awal 1439 H

12 Februari 2018 M

Panitia Ujian:

1. PengawasUmum : Dr. H. Rahman Rahim SE., M.M

(RektorUnismuh Makassar)

2. KetuaUmum : Ismail Rasulong, SE., MM

(DekanFakultasEkonomi)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, SE.,M.Si

(WakilDekan I FakultasEkonomi)

4. Penguji: 1.Drs. H. Sultan Sarda, MM

2. Ismail Badollahi, SE,MSi,AK,CA

3. SamsulRizal,SE,MM

4. Drs. H. HamzahLimpo, MSi

ABSTRAK

Rahmat Hidayat, (2017). *“efektifitas anggaran pendapatan dan belanja pada pemerintah Kab. Gowa”*, Dibimbing oleh H. Hamzah Limpo, dan Ismail Badollahi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang efektifitas anggaran terhadap realisasi anggaran pada pemerintah Kab. Gowa. efektifitas anggaran pemerintah daerah diukur dengan hasil perhitungan persentase penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas anggaran terhadap realisasi anggaran mengalami peningkatan dilihat dari perhitungan persentase anggaran terhadap realisasinya.

Kata Kunci:*Anggaran daerah, laporan realisasi pemerintah daerah, efektifitas anggaran.*

ABSTRACT

Rahmat Hidayat, (2017). *"The effectiveness of the budget of income and expenditure on local government Kab. Gowa "*, Guided by H. Hamzah Limpo, and Ismail Badollahi, Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar.

This study aims to provide empirical evidence about the effectiveness of the budget on the realization of the budget at the government Kab. Gowa. the effectiveness of the local government budget is measured by the calculation of the ratio of variance, the effectiveness ratio and the ratio of local financial independence.

The results of this study indicate that the effectiveness of the budget on the realization of the budget has increased seen from the calculation of the percentage of the budget on the realization.

Keywords: *Regional budget, local government realization report, budget effectiveness.*

Motto penulis

*Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh
jalan menuju ke sana*

*Sebuah tantangan akan selalu menjadi
beban, jika itu hanya dipikirkan*

*Sebuah cita-cita juga akan jadi beban,
jika itu hanya angan-angan.*

*Oleh karena itu, berusahalah untuk
mewujudkan cita-citamu, agar tidak jadi
beban pikiran dan hanya jadi angan-
angan saja.*

Dikutip oleh: rahmat hidayat

KATA PENGANTAR



Bismillaahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya kepada penulis sehingga proposal ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Proposal ini berjudul “*efektifitas anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah kab. Gowa*”.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak terutama dari Drs.H. Hamzah Limpo,MS, selaku Pembimbing I dan Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan proposal ini. Karena itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima Kasih. Terkhusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas dorongan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Harapan penulis, semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak.CA selaku ketua jurusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Dr. H. Hamzah Limpo,MS, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak.CA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu kegiatan penulis dan memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan karya ilmiah ini
7. Bapak Drs. Baharuddin.T sebagai kepala Badan dan seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Bupati Kabupaten Gowa yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Keluarga besar saya yang selalu memberikan saran dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Ak 9.13 terkhusus yang telah memberikan semangat, dukungan, serta warna dan pengalaman-pengalaman dalam hidup penulis yang tidak bisa terlupakan.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, bukan para pemberi bantuan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni Bidang Akuntansi, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Akuntansi.

Makassar, 03 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Efektifitas	5
B. Pengertian dan Fungsi Anggaran	5
C. Jenis- Jenis dan Klasifikasi Anggaran	7
D. Tujuan Pengendalian Anggaran	12
E. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran	14

F. Penelitian Terdahulu	17
G. Kerangka pikir	26
H. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
B. Jenis dan Sumber Data.....	28
C. Metode Pengumpulan Data.....	29
D. Metode Analisis	30
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Pemerintah Kabupaten Gowa	32
B. Visi Misi Dan Tujuan	36
C. Struktur Organisasi	39
D. Job Deskripsi	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektifitas	42
B. Bentuk Dan Susunan APBD Pemerintah Daerah Kab. Gowa	42
C. Analisis Varians Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kab. Gowa	51
D. Analisis Rasio	70
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan penelitian terdahulu	23
Tabel 2 Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang kemendagri	42
Tabel 3.1 Ringkasan APBD Kab. Gowa Tahun 2013.....	43
Tabel 3.2 Ringkasan APBD Kab. Gowa Tahun 2014.....	44
Tabel 3.3 Ringkasan APBD Kab. Gowa Tahun 2015.....	45
Tabel 4.1 Ringkasan Laporan Realiasi anggaran tahun 2013	47
Tabel 4.2 Ringkasan Laporan realisasi anggaran tahun 2014	48
Tabel 4.3 Ringkasan Laporan realisasi anggaran tahun 3015	50
Tabel 5.1 Ringkasan Varians Pendatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Gowa tahun 2013	53
Tabel 5.2 Ringkasan Varians Pendatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Gowa tahun 2014	59
Tabel 5.3 Ringkasan Varians Pendatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Gowa tahun 2015	64
Tabel 6 Rasio Efektifitas Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kab. Gowa T.A 2013-2015	68
Tabel 7 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kab. Gowa T.A 2013-2015	69
Tabel 8 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Pemerintah Daerah Kab. Gowa T.A 2013-2015	70

DAFTAR GAMBAR

Kerangka pikir	26
Struktur Organisasi	39

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah, sesuai dengan pendapat mardiasmo(2009), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam pemanfaatan sumber daya dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran merupakan alat perencanaan manajerial dalam bentuk keuangan yang berisi aktivitas yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu.

Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara responsive terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri,(Bastian 2006). Adapun misi utama undang-undang no. 32 tahun 2004 dan undang-undang no. 33 tahun 2004 tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan.

Oleh karena itulah, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian 2006:6). Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu

daerah otonomi yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan dibidang keuangan daerah (Sujono 2005).

Analisa prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber- sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan di masyarakat di daerah. Penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Kemudian saat ini keluar peraturan tentang pemerintah RI No. 58 tahun 2004 dan permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menggantikan Kepmendagri No.29 tahun 2002. dalam reformasi anggaran tersebut, proses penyusunan APBD diharapkan menjadi lebih baik dan lebih partisipasi. hal tersebut sesuai dengan permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategi daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah. Serta pokok- pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah.

Pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang terdiri dari: (1) neraca, (2) Laporan Realisasi Anggaran, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dwi Sudaryanti dengan judul “penelitian pengaruh penganggaran terhadap kinerja aparat pemda

melalui sistem informasi keuangan daerah (studi kasus: pemda kab kudus)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemda Kudus melalui SIKD yang diimplementasikan yang berguna dalam penganggaran untuk menghasilkan anggaran yang berkualitas. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian terdahulu hanya menilai kinerja pemerintah hanya pada segi anggaran saja tanpa melihat laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran tersebut.

Penyusunan laporan keuangan tersebut berpedoman pada ketentuan pokok yang menyangkut pengelolaan keuangan serta yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan penerapannya di perkuat oleh peraturan daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan " **Efektifitas Anggaran terhadap Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kab. Gowa**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: "Bagaimana Tingkat Efektifitas Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kab. Gowa"

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui tingkat efektifitas anggaran terhadap realisasi anggaran pada pemerintah daerah kab. Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menganalisis mengenai efektifitas anggaran dan realisasi anggaran.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektifitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektifitas

Efektifitas secara umum menunjukkan sampai dimanatercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat” efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu telah tercapai dimana semakin besar persentase target maka semakin tinggi efektifitasnya.

B. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Pengertian atau defenisi anggaran bermacam-macam, para pakar mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian anggaran sehingga mudah dipahami.

Menurut *National on Governmental Accounting (NCGA)* yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, defenisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu dikutip oleh (Bastian, 2006:164).

Anggaran berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan

moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo (2006)).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana menyeluruh operasi suatu kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif (dalam unit dan uang) untuk jangka waktu tertentu.

b. Fungsi anggaran

Para ahli menekankan fungsi anggaran sebagai salah satu alat manajemen suatu perusahaan, instansi ataupun organisasi untuk: perencanaan, koordinasi, dan pengendalian.

1. Perencanaan

Perencanaan yang dituangkan dalam anggaran menuntut pemikiran yang *lebih teliti* dan akan memberikan gambaran yang lebih *nyata* dalam angka uang.

2. Koordinasi

Koordinasi berarti penyerasian, penyelarasan. Melalui anggaran, kegiatan operasi tiap-tiap bagian dapat diselaraskan, dipadukan kerjanya ke arah sasaran yang ditentukan.

3. Pengendalian

Pengendalian atau kontrol berarti pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana anggaran.(LPPM Akunting Manajemen)

penyusunan anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum. Mardiasmo(2006)mengungkapkan ada beberapa fungsi utama dari adanya anggaran yaitu:

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan(*planning tool*)
- 2) Anggaran sebagai alat pengendalian(*control tool*)
- 3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal(*fiscal tool*)
- 4) Anggaran sebagai alat politik(*political tool*)
- 5) Anggaran sebagai alat kordinasidan komunikasi(*kordinationand communication*)
- 6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja(*performance measurement tool*)
- 7) Anggaran sebagai alat motivasi(*motivation tool*)
- 8) Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik(*public sphere*).

C. Jenis-Jenis dan Klasifikasi Anggaran

a. Jenis-jenis anggaran

1. Menurut jangka waktu

Dilihat dari jangka waktu yang dinyatakan dalam anggaran, biasanya di bedakan:

- a). anggaran jangka pendek, yaitu anggaran dalam jangka waktu satu tahun atau kurang (anggaran bulanan, anggaran triwulan dan sebagainya).
- b). anggaran jangka panjang yaitu anggaran yang mencakup waktu lebih dari satu tahun atau sama dengan satu tahun. Anggaran ini digunakan untuk perencanaan jangka panjang.

2. Menurut bidangnya

Dilihat dari bidangnya maka terdapat terdapat banyak macam anggaran. Dari berbagai macam anggaran ini jika dipadukan maka disebut dengan *anggaran* induk (master budget) yang dapat dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu:

- a). Anggaran operasional yakni sekelompok anggaran yang tujuannya untuk menyusun anggaran suatu kegiatan.
- b). anggaran keuangan, yakni sekelompok anggaran yang tujuannya untuk menyusun anggaran neraca.(LPPM.Akunting Manajemen).

b. Klasifikasi Anggaran

1. Klasifikasi Anggaran Menurut Organisasi

Klasifikasi anggaran menurut organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi. Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi disebut Bagian Anggaran (BA).

2. Klasifikasi Menurut Fungsi

Klasifikasi anggaran menurut fungsi, merinci anggaran belanja menurut fungsi dan sub fungsi. Fungsi itu sendiri memiliki pengertian perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi.

3. Klasifikasi Anggaran Menurut Ekonomi (Jenis Belanja)

Jenis belanja dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. Adapun klasifikasi anggaran menurut jenis belanja terdapat 8 jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

b. Belanja Barang

Yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang

yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang (Operasional dan Non Operasional), belanja jasa, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas.

c. Belanja Modal

Yaitu pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya 1 tahun periode) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah mengenai batas minimal nilai kapitalisasi Untuk pengadaan peralatan dan mesin adalah batas minimal harga pasar per unit barang sebesar Rp. 300.000 dan untuk bangunan minimal sebesar Rp. 10.000.000. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercapat dalam registrasi aset terkait serta bukan untuk dijual.

d. Bunga Utang

Yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan jaminan. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari bagian anggaran BUN (Bendahara Umum Negara).

e. Belanja Subsidi

Yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Contohnya adalah belanja subsidi untuk BBM. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari bagian anggaran BUMN.

f. Belanja Bantuan Sosial (Bansos)

Yaitu transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

g. Belanja Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

h. Belanja Lain-lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori belanja pegawai,

belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Sumber dan referensi:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
2. Modul Kelas Reguler: Perencanaan dan Penganggaran. Edisi 05. PPAKP Kementerian Keuangan RI. Tahun 2012

D. Tujuan Pengendalian Anggaran

Setelah anggaran induk selesai disusun dan disahkan oleh pimpinan atau dewan komisaris, maka untuk selanjutnya setiap pegawai dalam pemerintahan terikat untuk mentaatinya. Dalam rangka pengendalian anggaran, termasuk juga keajiban untuk setiap akan mengeluarkan biaya diteliti lebih dahulu:apa ada anggarannya, berapa jumlahnya, dan untuk bulan apa. Juga untuk menghemat tanpa mengganggu kelancaran dan mutu jadi sasaran dapat dicapai dengan baiksedangkan biaya lebih hemat dan tentu lebih bagus.

Walaupun dalam keadaan memaksa, tidak dapat dilakukan penyimpangan (varians) semau-maunya sebab dapat menggoncangkan anggaran untuk keperluan lain. Apabila pos pembelian perlengkapan dipakai untuk membayar honor, pasti pembelian perlengkapan akan terganggu.sebaiknya untuk prosedur melakukan penyimpangan, siapa yang berwenang memberi izin, kalau perlu harus lewat rapat anggaran. Secara

periodik perlu dibuat laporan pelaksanaan yaitu yaitu laporan realisasi yang memuat data:

- a. Anggaran,
- b. Realisasi anggaran
- c. Penyimpangan atau varians(dalam unit, uang)
- d. Keterangan tentang varians yang besar.

Tujuan pengendalian anggaran adalah untuk melihat berapa besar penyimpangan yang terjadi dan perlu diteliti dan di bahas sebab- sebabnya, supaya dapat dilakukan tindakan koreksi berupa:

- a. Mengarahkan pelaksanaan kepada rencana (anggaran)
- b. Mengubah anggaran jika keadaan sudah memang sudah berubah

Dengan adanya pengendalian anggaran, manajemen mendapatkan informasi hasil keuangan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan sehingga dapat dihindarkan keterlambatan atau kekeliruan dalam mengambil keputusan.(LPPM. Akunting manajemen)

Apabila pegawai dilibatkan secara signifikan dalam proses penyusunan anggaran dengan pengendalian yang dilakukan oleh atasan, maka akan cenderung mendorong timbulnya ide-ide dari pegawai dan akan terjadi diskusi yang intensif antara pegawai dengan atasan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan akan meningkatkan kinerja. Desentralisasi dalam suatu organisasi berkaitan erat dengan struktur organisasi yang memberikan gambaran mengenai kekuasaan dalam suatu organisasi. organisasi dengan struktur desentralisasi akan merasa memiliki

pengaruh yang kuat untuk lebih berpartisipasi dalam perencanaan anggaran. Sebaliknya organisasi dengan struktur sentralisasi akan membuat bawahan kurang bertanggung jawab karena hanya mendapatkan porsi sedikit dalam perencanaan anggaran. Partisipasi pegawai akan efektif dalam organisasi yang strukturnya desentralisasi, sehingga nantinya akan meningkatkan kinerja pegawai.

Husin (2010) menemukan bahwa interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi secara positif berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

E. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

a. Pengertian Laporan Pertanggungjawaban realisasi anggaran

Hansen, Mowen (2005:116) mendefinisikan laporan pertanggungjawaban sebagai berikut “laporan pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka”.

Hansen, Mowen (2012:229) dalam laporan pertanggungjawaban memiliki empat elemen penting yaitu pembebanan tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau *benchmarking*, pengevaluasian kinerja dan pemberian penghargaan.

Sedangkan pertanggungjawaban menurut LM Samryn (2007:258) adalah sebagai berikut “laporan pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat

pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen”.

Dari definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa laporan pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang membagi struktur organisasi atas bagian-bagian atau pusat-pusat pertanggungjawaban yang memiliki otoritas dan tanggungjawab yang jelas. Dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan dilaporkan penyimpangan yang terjadi apakah terjadi defisit atau surplus anggaran terhadap realisasi anggaran.

b. Tujuan Dan Manfaat Laporan Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban menurut Robert N. Anthony dan Roger H. Hermanson (2006:57) mempunyai tujuan yaitu “Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya”. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang.

Manfaat akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2008:174) adalah:

1. Penyusunan anggaran (jika informasi akuntansi pertanggungjawaban tersebut berupa informasi yang akan datang).

2. Penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban (jika informasi akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi masa lalu).
3. Pemotivasi manajer pusat pertanggungjawaban (jika informasi akuntansi pertanggungjawaban tersebut berupa informasi masa lalu).

Berdasarkan urian di atas, maka laporan pertanggungjawaban bermanfaat terhadap jalannya perusahaan atau pemerintahan, yaitu masing-masing tingkatan manajemen diharuskan menyusun anggarannya masing-masing kemudian melaksanakan dan melaporkannya. Hal ini dilakukan agar sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan laporan ini akan diketahui apakah rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga jika terjadi penyimpangan-penyimpangan akan dapat diselidiki untuk diketahui hal-hal yang menjadi penyebab dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang.

c. Pusat pertanggungjawaban

Menurut Hansen dan Mowen (2009: 560), pusat pertanggungjawaban adalah suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan tertentu.

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2009: 171), pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang

manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pusat pertanggungjawaban adalah bentuk tanggungjawab manajer terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan karyawan.

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya oprasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. "Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *goodgovernance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukan bagaimana menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien"

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan ouput/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telahditetapkan. "Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan *outcome* dengan *output*"

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Makka, dkk (2015). Penelitian tersebut berjudul "Analisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada dinas pendapatan pengelola keuangan dan asset daerah di kota mobagu". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran

T.A 2013 sampai dengan T.A 2014 masing-masing adalah sebagai berikut: T.A 2013 realisasi belanja sebesar 87.26% dan T.A 2014 sebesar 85.40% dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja daerah yang baik yaitu dengan adanya efisiensi belanja untuk tahun anggaran 2013 sebesar 12.73% dan tahun anggaran 2014 sebesar 14.60%. Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal menunjukkan kinerja yang baik, terdapat efisiensi yang memadai terlebih lagi untuk tahun anggaran 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugeha, dkk(2015). Penelitian tersebut berjudul “ Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pendapatan dari Pemerintah Kota Tomohon cukup baik, yang dapat dilihat dari realisasi pendapatan tahun 2012 dan 2013 sudah melebihi target, kecuali pendapatan pada tahun 2011 yang tidak memenuhi target. Tetapi terjadi peningkatan pendapatan selama 3 tahun, jadi dapat dikatakan kinerja Pemerintah kota Tomohon cukup baik. Kinerja belanja dari Pemerintah Kota Tomohon sudah sangat baik dilihat dari belanja yang relatif kecil dan ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan kota dan lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Langgeng, dkk(2012). Penelitian tersebut berjudul “Penerapan akuntansi pertanggungjawaban Sebagai alat

penilaian kinerja pusat biaya”. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Bangun Kubah Sarana sudah cukup memadai walaupun masih ada sedikit kekurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saerang, dkk(2010). Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Komitmen, dan Pendidikan terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Sulawesi Utara”.Hasil penelitian menunjukkan hanya variabel Komitmen berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat meningkatkan Komitmen sumber daya manusia khususnya pegawai yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan disetiap SKPD dengan memberikan insentif kepada setiap PPK SKPD/PPKD.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanida, dkk (2013).Penelitian tersebut berjudul “pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan pengujian, partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, membuktikan bahwa bahwa partisipasi pegawai dalam proses penyusunan anggaran di SKPD Palangka Raya dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti (2013).penelitian tersebut berjudul ”pengaruh penganggaran terhadap kinerja aparat pemda melalui

sistem informasi keuangan daerah (studi kasus: pemda kab kudus)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemda Kudus melalui SIKD yang diimplementasikan yang berguna dalam penganggaran untuk menghasilkan anggaran yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2011). Penelitian tersebut berjudul “studi fenomenologi : pemahaman atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintahan daerah”. Hasil penelitian menunjukkan disimpulkan bahwa sedikit sekali Anggota Banggar yang mengetahui bagaimana Laporan Keuangan Pemerintah, apa isinya dan bagaimana mengevaluasinya sangatlah minim pengetahuannya. Bagaimana mampu mewarnai dan berargumentasi jika yang mengerti atau memahami Laporan Keuangan sangatlah minim. Jika yang tidak memahami Laporan Keuangan lebih banyak dari pada yang memahami maka sangat memungkinkan kalah dalam berargumentasi karena DPRD adalah bersifat kolegial (bersama) sehingga suara terbanyak merupakan keputusan dalam suatu musyawarah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahfiza (2015). Penelitian tersebut berjudul “pengaruh sistem pengelolaan keuangan terhadap efektivitas penganggaran pada badan layanan umum (blu) universitas negeri gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pengelolaan Keuangan (X) yang meliputi: Perencanaan dan Penganggaran (X1), Prosedur Operasi Standar Badan Layanan Umum (X2), Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Keuangan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo . Sebesar 90,7%. dan selebihnya 9,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti, misalnya pengawasan keuangan dan evaluasi kerja pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo

Penelitian yang dilakukan oleh Bakri (2015). penelitian tersebut berjudul “pengaruh efektivitas pengendalian anggaran terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada dinas pendidikan kabupaten boalemo”. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan perhitungan Secara simultan Perencanaan, Umpan Balik dan Interaksi Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja.

penelitian yang dilakukan oleh Arifin w(2015). “penelitian tersebut berjudul pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi”. hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa para pejabat struktural di kabupaten pekalongan memiliki kepentingan profesi yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi tidak mampu bertindak sebagai moderating yang mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan tidak menggambarkan bahwa semakin baik pengendalian akuntansi yang

diterapkan oleh suatu organisasi maka semakin besar kemungkinan perencanaan dan tujuan organisasi.

Tabel 1

Ringkasan penelitian terdahulu.

No.	Penulis/ tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Harry Al Makka, David P.E. Saerang, Inggriani Elim (2015)	Analisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada dinas pendapatan pengelola keuangan dan asset daerah di kota mobagu.	Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menguraikan hasil analisis dari belanja serta bagaimana kinerjanya terhadap LRA.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran T.A 2013 sampai dengan T.A 2014 masing-masing adalah sebagai berikut: T.A 2013 realisasi belanja sebesar 87.26% dan T.A 2014 sebesar 85.40% dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja daerah yang baik yaitu dengan adanya efisiensi belanja untuk tahun anggaran 2013 sebesar 12.73% dan tahun anggaran 2014 sebesar 14.60%. Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal menunjukkan kinerja yang baik, terdapat efisiensi yang memadai terlebih lagi untuk tahun anggaran 2013.
2.	Figih Fez Sugeha, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung. (2015)	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013	Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, menurut Sugiyono (2013: 8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang	Kinerja pendapatan dari Pemerintah Kota Tomohon cukup baik, yang dapat dilihat dari realisasi pendapatan tahun 2012 dan 2013 sudah melebihi target, kecuali pendapatan pada tahun 2011 yang tidak memenuhi target. Tetapi terjadi peningkatan pendapatan selama 3 tahun, jadi dapat dikatakan

			alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil peneitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.	kinerja Pemerintah kota Tomohon cukup baik. Kinerja belanja dari Pemerintah Kota Tomohon sudah sangat baik dilihat dari belanja yang relatif kecil dan ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan kota dan lain sebagainya.
3.	Yogi Setiyo Langgeng, Endang Dwi Retnani (2012)	Penerapan akuntansi pertanggungjawaban Sebagai alat penilaian kinerja pusat biaya	pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Bangun Kubah Sarana sudah cukup memadai walaupun masih ada sedikit kekurangan.
4.	David Paul Elia Saerang1, Heince Ruddy Nicky Wokas2 (2010)	Pengaruh Komitmen, dan Pendidikan terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Sulawesi Utara	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang dikuantitatifkan yakni Data Primer diperoleh langsung dari setiap SKPD yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan objek penelitian yaitu berupa kuesioner yang disebarakan.	Hasil penelitian menunjukkan hanya variabel Komitmen berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat meningkatkan Komitmen sumber daya manusia khususnya pegawai yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan disetiap SKPD dengan memberikan insentif kepada setiap PPK SKPD/PPKD.
5.	Maria	pengaruh	Metode pengambilan	Berdasarkan hasil

	Yanida, Made Sudarma, Aulia Fuad Rahman (2013)	partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah	sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>proportional random sampling</i> , yaitu teknik pengambilan sampel secara acak namun proporsional.	pengujian, partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, membuktikan bahwa bahwa partisipasi pegawai dalam proses penyusunan anggaran di SKPD Palangka Raya dapat meningkatkan kinerja pegawai.
6.	Dwi Sudaryanti (2013)	pengaruh penganggaran terhadap kinerja aparat pemda melalui sistem informasi keuangan daerah (studi kasus: pemda kab kudus)	Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan penganggaran, SIKD dan kinerja.	penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemda Kudus melalui SIKD yang diimplementasikan yang berguna dalam penganggaran untuk menghasilkan anggaran yang berkualitas.
7.	Fityan Izza Noor Abidin (2011)	penelitian studi fenomenologi : pemahaman atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan disimpulkan bahwa sedikit sekali Anggota Banggar yang mengetahui bagaimana Laporan Keuangan Pemerintah, apa isinya dan bagaimana mengevaluasinya sangatlah minim pengetahuannya. Bagaimana mampu mewarnai dan berargumentasi jika yang mengerti atau memahami Laporan Keuangan sangatlah minim. Jika yang tidak memahami Laporan
8.	Mahfiza (2015)	Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah	Metode yang dipakai adalah metode analisis data.	Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pengelolaan Keuangan (X) yang meliputi : Perencanaan dan Penganggaran (X1), Prosedur Operasi Standar Badan Layanan Umum (X2), Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan

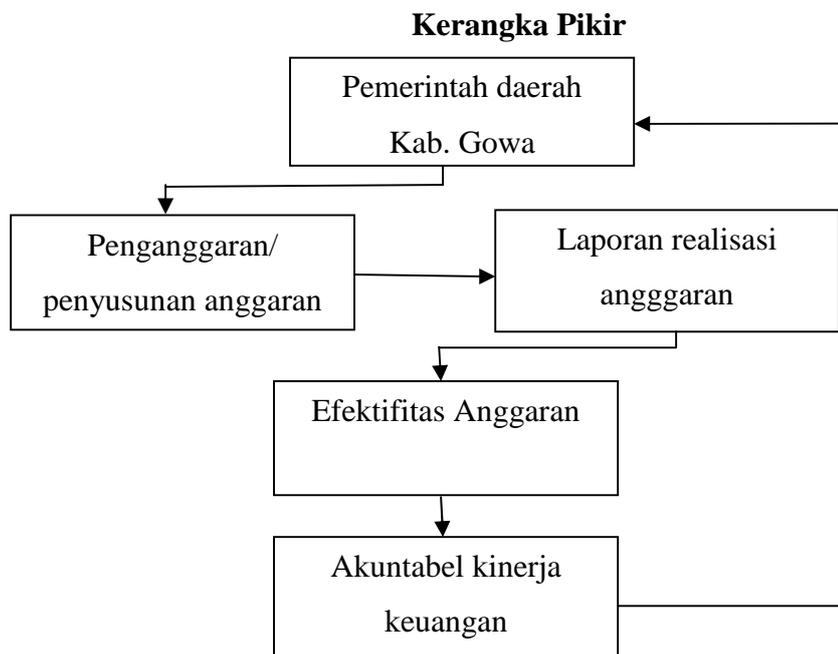
		Kabupaten Tanah Datar)		terhadap Efektivitas Penganggaran (Y) pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Gorontalo . Sebesar 90,7%. dan selebihnya 9,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti, misalnya pengawasan keuangan dan evaluasi kerja pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo
9.	Bakri (2015)	pengaruh efektivitas pengendalian anggaran terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada dinas pendidikan kabupaten boalemo	Penelitian ini merupakan penelitian survei.	Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan perhitungan Secara simultan Perencanaan, Umpan Balik dan Interaksi Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja.
10.	Beny Arifin W (2015)	“penelitian tersebut berjudul pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi”	Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survei. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling.	hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa para pejabat struktural di kabupaten pekalongan memiliki kepentingan profesi yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi tidak mampu bertindak sebagai moderating yang mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan tidak menggambarkan bahwa semakin baik pengendalian akuntansi yang diterapkan oleh suatu organisasi maka semakin besar kemungkinan perencanaan dan tujuan organisasi.

Sumber data: data diolah penulis

G. Kerangka fikir

kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Hubungan yang dijelaskan adalah hubungan antara variable bebas dengan variabel yang lain yang menyertainya.

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual penelitian seperti pada gambar disebelah.



H. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006 : 135). Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah target anggaran pada pemerintah daerah Kab.Gowa sudah efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di daerah Gowa, tepatnya pada kantor Bupati gowa. karena pada kantor ini merupakan kantor pemerintahan yang menggunakan anggaran untuk membiayai program kerjanya . Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 2(dua) bulan dan dilakukan di bulan April 2017 s/d Mei 2017.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. data kuantitatif

Data kuantitatif adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala numerik/bilangan. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa data anggaran dan realisasinya.

b. Data kualitatif

Pengertian data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.

Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu:

c. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung kepada permasalahan yang diteliti.

d. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan dan arsip perusahaan. Data ini dapat berupa rekapitulasi laporan keuangan pemerintah.

C. Metode Penelitian

Guna mendeskripsikan masalah adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka

Yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diambil, baik berupa buku, peraturan pemerintah, peraturan daerah, tulisan ilmiah *World Wide Web* (www) dan sebagainya.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke kantor Bupati gowa.

D. Metode Analisis

Dalam menganalisa data digunakan metode analisis :

1. Analisa deskriptif

Yaitu dengan memberikan penjelasan terhadap hasil perhitungan analisis varians dan persentase anggaran terhadap realisasi anggaran

2. Analisa kuantitatif

Untuk mengetahui tingkat efektifitas yang terjadi apakah anggaran lebih tinggi daripada realisasi ataukah sebaliknya. Untuk mengetahui hal tersebut maka digunakan analisa varians dan persentase dengan rumus:

$$\mathbf{Varians = Anggaran - realisasi anggaran}$$

Keterangan: jika anggaran lebih tinggi dari realisasi anggaran maka terjadi penyimpangan (variens) yang defisit (tidak efektif). Jika realisasi anggaran lebih tinggi maka terjadi penyimpangan surplus (efektif).

Untuk mengetahui efektifitas digunakan pula rumus persentase sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas anggaran} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan daerah (RKKD)

Untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pemerintah Kabupaten Gowa

Sistem kekuasaan yang berhubungan dengan pemilikan tanah lebih jelas lagi terlihat dalam surat pemerintahan kerajaan. Dalam uraian kesejarahan, kita dapat melihat bahwa gelar kebangsawanan selalu dihubungkan dengan nama negeri tertentu. Dalam kehidupan adat feodelisme masyarakat Makassar terdapat dua macam kepemimpinan. Kepemimpinan yang pertama disebut *Pamminawangang Tojeng* yang dapat diterjemahkan sebagai *kepemimpinan murni*. Kepemimpinan kedua diberi nama *Pamminawangngang Tunipinawang* yang dapat diterjemahkan sebagai *Kepemimpinan Penguasa*. Kepemimpinan *Tojeng* terdapat di Desa-desanya, menurunkan pula gelar-gelar yang berbeda-beda menurut sejarah desa masing-masing. Sedangkan Kepemimpinan *Tunipinawang* berkembang di pusat pemerintahan kerajaan. Kerajaan Gowa pada fase terakhir perkembangannya digambarkan sebagai berikut: Gallarang, seperti gallarang Mangasa, Gallarang Tombolo

Pada tanggal 31 Desember 1906, Gubernur Celebes dan daerah takluknya mengeluarkan surat keputusan No. 6041/2, yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 30 Maret 1907 No. 16, untuk menetapkan wilayah Gowa Barat. Daerah ini meliputi distrik-distrik : Jongaya, Borisallo, Manuju, Pattallasang, dan Paccelokang.

Daerah ini dipimpin oleh seorang Pamongpraja Belanda, yaitu Controluer yang berkedudukan di Pandang-Pandang.

Pada Tanggal 01 Juli 1926 dibentuklah oleh pemerintah Belanda sebuah pemerintahan yang disebut Federasi Gowa, yang memiliki perlengkapan dan anggaran rumah tangga sendiri. Lembaga ini merupakan suatu langkah untuk merehabilitir Gowa kembali sebagai sebuah kerajaan seperti sebelum tahun 1906.

Susunan Pemerintahan di Gowa pada Tahun 1935 adalah sebagai berikut :

- a. Onderafdeling Gowa di kepalai oleh seorang Controleur dibantu oleh seorang aspirant controleur dan tiga orang Pamongpraja Bumi Putra.
- b. Federasi Gowa diketuai oleh ***I Tjoneng Daeng Mattajang Karaeng Mandjalling.***
- c. Tiga Belas Adat gemeenschap :
 - 1). Mangasa dikepalai oleh seorang Gallarang
 - 2). Tombolo dikepalai oleh seorang Gallarang
 - 3). Borongloe dikepalai oleh seorang Gallarang
 - 4). Karuwisi dikepalai oleh seorang Karaeng
 - 5). Pattallassang dikepalai oleh seorang Karaeng
 - 6). Borisallo dikepalai oleh seorang Karaeng
 - 7). Parigi dikepalai oleh seorang Karaeng
 - 8). Manuju dikepalai oleh seorang Karaeng
 - 9). Bontonompo dikepalai oleh seorang Karaeng

- 10). Limbung dikepalai oleh seorang Nulbestuur Assistant
- 11). Malakaji dikepalai oleh seorang Bestuur Assistant
- 12). Pao dikepalai oleh seorang Arung
- 13). Kindang dikepalai oleh seorang Karaeng

Untuk mendampingi Raja Gowa oleh Residen Celebes Selatan diangkat dua orang pejabat tinggi kerajaan :

1. *I Pabisei Daeng Paguling Karaeng Kapatang* sebagai Tumailalang Towa.
2. *I Tjoneng Daeng Mattojeng Karaeng Mandjalling* sebagai Tumailalang Lolo.

Pada tahun 1946, Raja Gowa *I Mangngimangi Karaeng Bontonompo* wafat lalu digantikan oleh putranya yang bernama *Andi Idjo Karaeng Lalolang* dengan gelar Sultan Muhammad Abdulkadir Aididdin. Pelantikan Raja inipun harus disertai dengan penandatanganan perjanjian bersama pemerintah Hindia Belanda seperti apa yang telah dilakukan oleh Ayahandanya. Untuk membantu melaksanakan pemerintahan, oleh residen Celebes Selatan diangkat pejabat-pejabat tinggi kerajaan, yakni :

- 1). Andi Baso Daeng Rani Karaeng Bontolangkasa menjadi Pabbicara butta.
- 2). Andi Manrurungi Daeng Muang Karaeng Sumanna sebagai tumailalang towa,
- 3). Andi Laodanriu Bontonompo sebagai Tuk kajannangang.
- 4). Andi Mappasiling Daeng Ngeppo Karaeng Sapanang sebagai tumailalang lolo.

5). Hamzah Daeng Tompo Gallarang Borongloe sebagai Paccallaya.

Dengan melihat bahwa dalam kehidupan adapt dan feodalisme masyarakat Makassar terdapat dua macam kepemimpinan. Kepemimpinan pertama disebutnya *Pamminawangngang tojeng* (Kepemimpinan murni) terdapat di desa-desa. Kepemimpinan kedua diberi nama *Pamminawangngang tunipinawang* (Penguasa) berkembang di pusat pemerintahan kerajaan.

Gelar penguasa desa terdapat dalam lingkungan Kerajaan Gowa pada fase terakhir perkembangannya, sebagai berikut :

1. *gallarang*, seperti *gallarang Mangasa*, *gallarang tombolo*, *dsb.*
2. *anrongguru*, seperti *anrongguru Lempangang*, *anrongguru Moncobalang*, *dsb.*
3. *daeng*, seperti *daeng pallangga*, *daeng paku*.
4. *batang banoa*, seperti *batang banoa Bajeng*, *batang banoa Pammase*.
5. *jannang*, seperti *jannang Gentungan*, *jannang Data*, *dsb.*
6. *aruk*, seperti *aruk Pao*.

Adapun Wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa dalam periode ini, sama dengan wilayah Kabupaten Gowa sebelum Kepres 19/1069 tentang perluasan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.

Andi Idjo Karaeng Lalolang menjadi kepala daerah Gowa pertama dengan surat keputusan Menteri Dalam negeri Tanggal 16 Februari 1957, No. 7/2/24, dengan resmi diangkat menjadi Kepala Daerah Gowa,

Pamongpraja atau pegawai negeri dalam struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam masa pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT), dari tahun 1946 sampai tahun 1950, Kerajaan Gowa termasuk anggota dari pemerintahan gabungan Celebes Selatan yang dibentuk oleh Negara Indonesia Timur (NIT). Raja Gowa yang menjadi kepala Pemerintahan negeri di Gowa, *Andi Idjo Karaeng Lalolang* sebagai ketua Hadat Tinggi Celebes Selatan keluar dari ikatan ketatanegaraan NIT dan bergabung ke dalam pemerintahan Republik Indonesia Yogyakarta pada tanggal 26 April 1950.

Akhir dari fase transisi ini terjadi ketika Gowa yang merupakan daerah swapraja yang bergabung dalam pemerintahan *afdeling* Makassar meminta untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom.

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

- a. **Berkualitas**, mengandung makna sebagai kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, religius dan bermartabat sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial ekonominya secara inklusif. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak-hak anak, dan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius.

- b. **Mandiri**, dimaknakansebagaikondisimasyarakat yang memiliki kemampuan ekonomisehinggampumemecahkanmasalahny asendiridenganmengoptimalkansumberdaya yang ada. Kondisitersebutditandaidenganmeningkatnyapengembanganpotensisu mberdayaalamlokal danpemberdayaanekonomikerakyatan.
- c. **Berdayasaing**, dimaknakansebagaikondisidaerah yang memilikikeunggulankomparatifdankompetitifmelaluipembangunaninfr astruktur dan pengembangan wilayahkecamatan, desadankelurahan dengan memperhatikankelestarianlingkungan. Kondisitersebutditandaidenganmeningkatnyaaksesibilitasdankualitasin frastruktur, terkendalinyapemanfaatanruang, meningkatnyakualitaskawasanpermukiman, meningkatnyakapasitaspemerintahkecamatan, desadankelurahan, meningkatnyapengelolaankawasan, danmeningkatnyakualitaslingkungan.
- d. **Tata kelolapemerintahan yang baik**, dimaknakansebagaikondisipemerintahan yang inovatifdalampenyelenggara antarakekolapemerintahan yang baik, bersihdandemokratis. Kondisitersebutditandaidenganmeningkatnyakualitaspelayanan publik, meningkatnyakapasitas, transparansi, partisipasi, danakuntabilitaskinerjainstansipemerintah,

serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis.

2. Misi

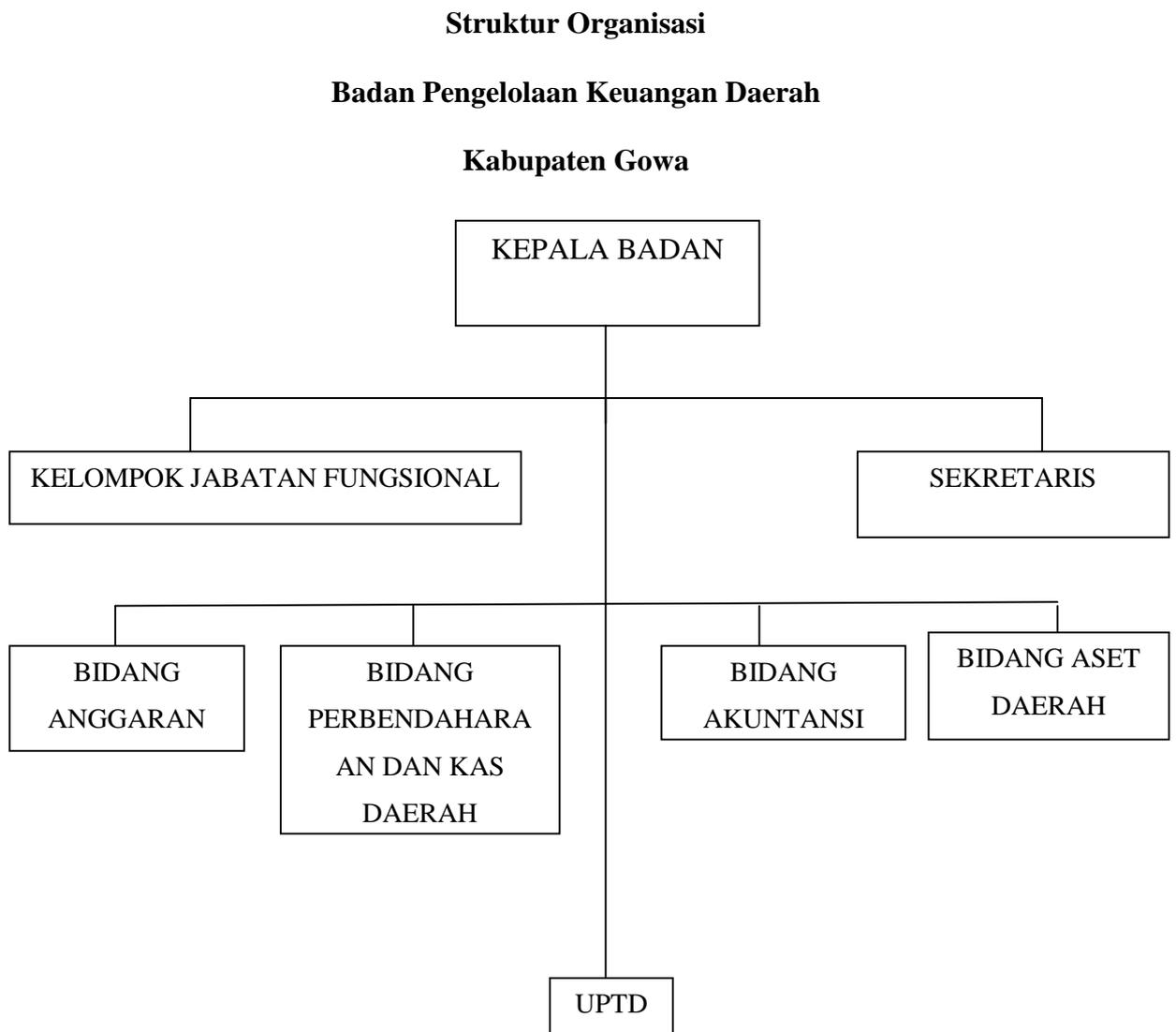
- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
- b. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan perekonomian rakyat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor.
- d. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
- e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

3. Tujuan

- a. menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran
- b. meningkatkan pendapatan per kapita
- c. mendorong pertumbuhan nilai investasi
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan opini BPK terhadap laporan keuangan
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama

- f. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif.

C. Struktur Organisasi



Sumber data: data diolah penulis

D. Job Description

KEPALA BADANKEUANGAN :merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

SEKRETARIAT :merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH : merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pendapatan Asli Daerah.

BIDANG AKUNTANSI : merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Akuntansi.

BIDANG ANGGARAN : merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Anggaran.

BIDANG ASET DAERAH : merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Aset Daerah.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL: setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas

Efektifitas secara umum menunjukkan sampai dimanatercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat” efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu telah tercapai dimana semakin besar persentase target maka semakin tinggi efektifitasnya.

Tabel. 2

Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang kemendagri

Rasio efektifitas (%)	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 – 59.99	Tidak efektif
60 – 79.99	Efektif
Diatas 80	Sangat efektif

Sumber : Litbang kemendagri, 1991

B. Bentuk Dan Susunan APBD Pemerintah Daerah Kab. Gowa

1. Anggaran

Anggaran berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Berikut ini adalah laporan anggaran pemerintah kab. Gowa pada tahun 2013

Tabel 3.1
Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab.Gowa
Tahun 2013

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PENDAPATAN	1.064.035.897.036,00
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.002.562.462,00
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	926.613.741.574,00
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	34.419.593.000,00
2	BELANJA	1.192.611.129.390,30
2,1	BELANJA OPERASI	878.944.658.739,66
2,2	BELANJA MODAL	312.270.194.849,79
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.396.275.800,85
2,4	TRANSFER	25.342.131.257,00
3	PEMBIAYAAN	153.917.363.611,30
3.1	PENERIMAAN DAERAH	168.072.667.813,30
3.2	PENGELUARAN DAERAH	14.155.304.202,00
	Pembiayaan Netto	153.917.363.611,30

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Laporan Anggaran pada kantor bupati Kabupaten Gowa pada tahun 2013, jumlah anggaran pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain- lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp 103.002.562.462,00, Rp 926.613.741.574,00,Rp 34.419.593.000,00, Jumlah keseluruhan anggaran pendatan adalah sebesar Rp 1.064.035.897.036,00. Jumlah belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer adalah sebesar Rp 878.944.658.739,66 Rp 312.270.194.849,79 Rp1.396.275.800,85, Rp25.342.131.257,00jumlah keseluruhan belanja adalah sebesar Rp 1.217.953.260.647,30. Jumlah keseluruhan anggaran dikurang belanja adalah sebesar (Rp 153.917.363.611,30). Jumlah anggaran

untuk pembiayaan yang terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah adalah sebesar Rp 168.072.667.813,30 dan Rp 14.155.304.202,00, jumlah pembiayaan netto sebesar Rp 153.917.363.611,30.

Tabel 3.2
Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Gowa
Tahun 2014

NO. URU T	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PENDAPATAN	1.213.569.933.814,00
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	132.991.839.068,00
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.047.874.423.026,00
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	32.703.671.720,00
2	BELANJA	1.393.392.424.387,00
2,1	BELANJA OPERASI	964.119.770.949,00
2,2	BELANJA MODAL	406.096.768.380,00
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.396.275.801,00
2,4	TRANSFER	21.779.609.257,00
3	PEMBIAYAAN	179.822.490.573,00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	215.580.377.912,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	35.757.887.339,00
	Pembiayaan Neto	179.822.490.573,00

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Laporan Anggaran pada kantor bupati Kabupaten Gowa pada tahun 2014, jumlah anggaran pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain- lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp 132.991.839.068,00, Rp 1.047.874.423.026,00, Rp 32.703.671.720,00, Jumlah keseluruhan anggaran pendatan adalah sebesar Rp 1.213.569.933.814,00. Jumlah belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer adalah sebesar Rp 964.119.770.949,00 Rp 406.096.768.380,00, Rp 1.396.275.801,00, Rp 21.779.609.257,00 jumlah keseluruhan belanja adalah sebesar Rp 1.393.392.424.387,00. Jumlah keseluruhan anggaran dikurang belanja adalah sebesar (Rp 179.822.490.573,00). Jumlah anggaran untuk pembiayaan yang terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah

adalah sebesar Rp 215.580.377.912,00 dan Rp 35.757.887.339,00, jumlah pembiayaan netto sebesar Rp 179.822.490.573,00.

Tabel. 3.3
Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Gowa
Tahun 2015

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
4	PENDAPATAN – LRA	1.438.673.206.610,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.283.776.458,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.291.389.430.152,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
5	BELANJA	1.449.278.177.677,55
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.035.284.775.401,40
5 . 2	BELANJA MODAL	413.981.286.389,30
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	12.115.886,85
6	TRANSFER	120.067.679.555,04
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.675.443.700,00
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	118.392.235.855,04
7	PEMBIAYAAN	130.672.650.622,59
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147.404.596.553,79
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.731.945.931,20
	PEMBIAYAAN NETTO	130.672.650.622,59

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Laporan Anggaran pada kantor bupati Kabupaten Gowa pada tahun 2015, jumlah anggaran pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain- lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp 147.283.776.458,00, Rp 1.291.389.430.152,00, Rp 0,00, Jumlah keseluruhan anggaran pendatan adalah sebesar Rp 1.438.673.206.610,00. Jumlah belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer adalah sebesarRp 1.035.284.775.401,40 Rp 413.981.286.389,30, Rp 12.115.886,85, Rp 120.067.679.555,04 jumlah keseluruhan belanja adalah sebesar Rp 1.449.278.177.677,55. Jumlah keseluruhan anggaran dikurang belanja adalah sebesar (Rp 130.672.650.622,59)Jumlah anggaran untuk pembiayaan yang terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah adalah sebesar

Rp 16.731.945.931,20 dan Rp 16.731.945.931,20, jumlah pembiayaan netto sebesar Rp 130.672.650.622,59.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Hansen, Mowen (2005:116) mendefinisikan laporan realisa sebagai berikut “laporan pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka”.

Hansen, Mowen (2012:229) dalam laporan pertanggungjawaban memiliki empat elemen penting yaitu pembebanan tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau *benchmarking*, pengevaluasian kinerja dan pemberian penghargaan.

Dari definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa laporan pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang membagi struktur organisasi atas bagian-bagian atau pusat-pusat pertanggungjawaban yang memiliki otoritas dan tanggungjawab yang jelas. Dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan dilaporkan penyimpangan yang terjadi apakah terjadi defisit atau surplus anggaran terhadap realisasi anggaran.

Berikut adalah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran:

Tabel 4.1
Ringakasan Laporan Realisasi anggaran
Tahun 2013

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	ANGGARAN	REALISASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PENDAPATAN	1.064.035.897.036,00	1.085.477.701.555,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.002.562.462,00	109.772.063.453,36
PENDAPATAN TRANSFER	926.613.741.574,00	940.633.467.102,29
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	34.419.593.000,00	35.072.171.000,00
BELANJA	1.192.611.129.390,30	1.033.366.710.707,00
BELANJA OPERASI	878.944.658.739,66	787.234.384.265,00
BELANJA MODAL	312.270.194.849,79	246.132.326.442,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.396.275.800,85	0,00
TRANSFER	25.342.131.257,00	23.654.312.557,00
PEMBIAYAAN	153.917.363.611,30	157.054.936.529,30
PENERIMAAN DAERAH	168.072.667.813,30	166.473.093.887,30
PENGELUARAN DAERAH	14.155.304.202,00	9.418.157.358,00

Sumber: data diolah penulis

Dari tabel diatas, dapat dilihat realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan relisasi pembiayaan. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp 1.085.477.701.555,65 lebih tinggi dari target anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain- lain pendapatan yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp 109.772.063.453,36, pendapatan transfer sebesar Rp 940.633.467.102,29, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 35.072.171.000,00.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.033.366.710.707,00 lebih kurang dari target anggaran. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi,

belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 787.234.384.265,00, belanja modal sebesar Rp 246.132.326.442,00, belanja tak terduga Rp 0,00, dan transfer sebesar Rp 23.654.312.557,00.

Jumlah realisasi pembiayaan sebesar Rp 157.054.936.529,30 lebih tinggi dari target anggaran. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Jumlah penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar Rp 166.473.093.887,30 dan Rp 9.418.157.358,00.

Tabel 4.2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
tahun 2014

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	ANGGARAN	REALISASI
2	3	4
PENDAPATAN	1.213.569.933.814,00	1.240.560.247.123,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH	132.991.839.068,00	149.352.694.369,65
PENDAPATAN TRANSFER	1.047.874.423.026,00	1.058.503.881.033,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	32.703.671.720,00	32.703.671.720,00
BELANJA	1.393.392.424.387,00	1.275.837.753.098,00
BELANJA OPERASI	964.119.770.949,00	874.729.833.942,00
BELANJA MODAL	406.096.768.380,00	379.683.313.320,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.396.275.801,00	0,00
TRANSFER	21.779.609.257,00	21.424.605.836,00
PEMBIAYAAN	179.822.490.573,00	185.294.101.915,42
PENERIMAAN DAERAH	215.580.377.912,00	215.431.066.970,95
PENGELUARAN DAERAH	35.757.887.339,00	30.136.965.055,53

Sumber: data diolah penulis

Dari tabel diatas, dapat dilihat realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi pembiayaan. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp

1.240.560.247.123,37 lebih tinggi dari target anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain- lain pendapatan yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp 149.352.694.369,65, pendapatan transfer sebesar Rp 1.058.503.881.033,72, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 32.703.671.720,00.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.275.837.753.098,00 lebih kurang dari target anggaran. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 874.729.833.942,00, belanja modal sebesar Rp 379.683.313.320,00, belanja tak terduga Rp 0,00, dan transfer sebesar Rp 21.424.605.836,00.

Jumlah realisasi pembiayaan sebesar Rp 185.294.101.915,42 lebih tinggi dari target anggaran. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Jumlah penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar Rp 215.431.066.970,95 dan Rp 30.136.965.055,53.

Tabel 4.3
Ringkasan laporan realisasi anggaran(LRA)
tahun 2015

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2015	REALISASI (Rp) 2015
PENDAPATAN	1.438.673.206.610,00	1.450.811.765.394,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.283.776.458,00	154.772.384.000,10
PENDAPATAN TRANSFER	1.291.389.430.152,00	1.295.542.132.863,90
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	497.248.530,00
BELANJA	1.449.278.177.677,55	1.353.026.929.890,00
BELANJA OPERASI	1.035.284.775.401,40	967.229.767.637,00
BELANJA MODAL	413.981.286.389,30	385.797.162.253,00
BELANJA TAK TERDUGA	12.115.886,85	0,00
TRANSFER	120.067.679.555,04	119.094.004.465,06
PEMBIAYAAN	130.672.650.622,59	143.555.250.883,79
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147.404.596.553,79	148.319.484.232,79
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.731.945.931,20	4.764.233.349,00

Sumber: data diolah penulis

Dari tabel diatas, dapat dilihat realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan relisasi pembiayaan. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp 1.450.811.765.394,00 lebih tinggi dari target anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain- lain pendapatan yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp 154.772.384.000,10, pendapatan transfer sebesar Rp 1.295.542.132.863,90, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 497.248.530,00.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.353.026.929.890,00 lebih kurang dari target anggaran. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah relisasi belanja operasi sebesar Rp 967.229.767.637,00, belanja modal sebesar Rp

385.797.162.253,00, belanja tak terduga Rp 0,00, dan transfer sebesar Rp 119.094.004.465,06.

Jumlah realisasi pembiayaan sebesar Rp 185.294.101.915,42 lebih tinggi dari target anggaran. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Jumlah penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar Rp 215.431.066.970,95 dan Rp 30.136.965.055,53.

C. Analisis Varians Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kab. Gowa

Varians anggaran adalah selisih antara target dan realisasi anggaran. Secara praktis, hampir selalu terjadi varians untuk semua komponen anggaran yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Namun, pencapaian anggaran yang favorabel mengindikasikan adanya varians yang tidak mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Varians anggaran terjadi karena banyak hal. Di sisi lain, varians akan menghasilkan sisa anggaran pada akhir tahun. Sisa anggaran di akhir tahun akan menjadi saldo awal tahun.

1. Varians Pendapatan

Kesenjangan anggaran pendapatan terjadi ketika target pendapatan ditentukan lebih rendah dari potensi yang sebenarnya. Untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan anggaran pendapatan ini, maka terlebih dahulu yang bisa saja bersifat laten (tersembunyi) karena tidak dinyatakan secara eksplisit (tertulis). Oleh karena itu, asas dalam penganggaran pendapatan disebut asas minimal.

2. Belanja

Varians belanja berbeda dengan penentuan target pendapatan yang menggunakan basis minimal, anggaran belanja menggunakan basis maksimal. Maksimal bermakna bahwa jumlah anggaran belanja merupakan

patokan jumlah pembayaran maksimal yang bisa dilaksanakan sebagai bentuk realisasi anggaran belanja. Berikut tabel ringkasan varians anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah kab. Gowa.

Tabel 5.1
Ringkasan Varians Pendatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Gowa
tahun 2013

U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PENDAPATAN	1.064.035.897.036,00	1.085.477.701.555,65	21.441.804.519,65	102,02
PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.002.562.462,00	109.772.063.453,36	6.769.500.991,36	106,57
PENDAPATAN TRANSFER	926.613.741.574,00	940.633.467.102,29	14.019.725.528,29	101,51
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	34.419.593.000,00	35.072.171.000,00	652.578.000,00	101,90
BELANJA	1.192.611.129.390,30	1.033.366.710.707,00	(159.244.418.683,30)	86,65
BELANJA OPERASI	878.944.658.739,66	787.234.384.265,00	(91.710.274.474,66)	89,57
BELANJA MODAL	312.270.194.849,79	246.132.326.442,00	(66.137.868.407,79)	78,82
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.396.275.800,85	0,00	(1.396.275.800,85)	0,00
TRANSFER	25.342.131.257,00	23.654.312.557,00	(1.687.818.700,00)	93,34
PEMBIAYAAN	153.917.363.611,30	157.054.936.529,30	3.137.572.918,00	102,04
PENERIMAAN DAERAH	168.072.667.813,30	166.473.093.887,30	(1.599.573.926,00)	99,05
PENGELUARAN DAERAH	14.155.304.202,00	9.418.157.358,00	(4.737.146.844,00)	66,53

Sumber data: data diolah penulis

Untuk mengetahui selisih yang terjadi apakah anggaran lebih tinggi daripada realisasi ataukah sebaliknya. Untuk mengetahui hal tersebut maka digunakan analisa varians dan persentase dengan rumus:

$$\mathbf{Varians = Anggaran - relisasi anggaran}$$

Keterangan: jika selisih anggaran pendapatan lebih rendah dari pada realisasi anggaran maka anggaran tersebut efektif. Jika selisih anggaran belanja lebih tinggi daripada realisasinya maka anggaran tersebut efektif.

Untuk mengetahui efektifitas digunakan pula rumus rasio efektifitas sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas anggaran} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Analisis deskriptif kuantitatif

1. varians

a. Anggaran pendapatan

Anggaran pendapatan terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah

Rp103.002.562.462,00- Rp 109.772.063.453,36=

Rp 6.769.500.991,36

2) Pendapatan Transfer

Rp 926.613.741.574,00- Rp 940.633.467.102,29=

Rp 14.019.725.528,29

3) Lain-lain pendapatan yang sah

Rp 34.419.593.000,00-Rp 35.072.171.000,00= Rp 652.578.000,00.

Total anggaran pendapatan dan realisasinya adalah:

Rp1.064.035.897.036,00–Rp1.085.477.701.555,65=Rp21.441.804.520.

Dari perhitungan diatas terlihat realisasi pendapatan lebih tinggi yaitu bertambah sebesar Rp21.441.804.520. jumlah pendapatan lebih tinggi dari pada yang telah dianggarkan,hal ini menunjukkan bahwa anggaran mampu terpenuhi.

b. Anggaran belanja terdiri dari:

1) Belanja operasi

Rp 878.944.658.739,66 - Rp787.234.384.265,00=

(Rp 91.710.274.474,66).

2) Belanja modal

Rp 312.270.194.849,79 – Rp 246.132.326.442,00 =
(Rp 66.137.868.407,79)

3) Belanja tak terduga

Rp 1.396.275.800,85 –Rp 0,00 =(Rp 1.396.275.800,85)

Total anggaran belanja daerah dan realisasinya adalah:

Rp 1.192.611.129.390,30–Rp 1.033.366.710.707,00=
(Rp159.244.418.683,30).

Dari perhitungan diatas terlihat realisasi belanja lebih rendah yaitu berkurang sebesar (Rp159.244.418.683,30). Jumlah anggaran lebih tinggi dari realisasi, hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja mampu terpenuhi. Anggaran pembiayaan

a. Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan daerah

168.072.667.813,30–Rp166.473.093.887,30= (Rp1.599.573.926,00)

2) Pengeluaran daerah

Rp14.155.304.202,00–Rp9.418.157.358,00 =(Rp4.737.146.844,00)

Jadi, total anggaran pembiayaan dan realisasinya adalah:

Rp153.917.363.611,30–Rp157.054.936.529,30 =Rp3.137.572.918,00

Jumlah anggaran pembiayaan lebih rendah daripada realisasinya sehingga bertambah sebesar Rp3.137.572.918,00.

2. Rasio efektifitas

a. Pendapatan

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{1.085.477.701.555,65}{1.064.035.897.036,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = 102,02\%$$

Dari perhitungan rasio efektifitas pendapatan diatas terlihat bahwa jumlah realisasi anggaran lebih besar dari pada yang telah dianggarkan sehingga tercapai tingkat efektifitas sebesar 102,02%.

b. Belanja

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{1.033.366.710.707,00}{1.192.611.129.390,30} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = 86,65\%$$

Dari perhitunhan diatas terlihat realisasi anggaran belanja lebih kecil daripada yang telah dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kab.gowa mampu mengefisienkan belanja sebesar 86,65%.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$\text{RKKD} = \frac{109.772.063.453,36}{940.633.467.102,29} \times 100\%$$

$$\text{RKKD} = 11,67 \%$$

Dari perhitungan diatas terlihat pendapatan asli daerah lebih kecil dari pada pendapatan transfer. Artinya tingkat kemandirian keuangan daerah belum efektif. Rasio kemandirian keuangan daerah kab. Gowa T.A hanya mencapai 11,67 %.

Tabel 5.2
Ringkasan varians pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah kab. Gowa
Tahun 2014

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PENDAPATAN	1.213.569.933.814,00	1.240.560.247.123,37	26.990.313.309,37	102,22
PENDAPATAN ASLI DAERAH	132.991.839.068,00	149.352.694.369,65	16.360.855.301,65	112,30
PENDAPATAN TRANSFER	1.047.874.423.026,00	1.058.503.881.033,72	10.629.458.007,72	101,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	32.703.671.720,00	32.703.671.720,00	0,00	100,00
BELANJA	1.393.392.424.387,00	1.275.837.753.098,00	(117.554.671.289,00)	91,56
BELANJA OPERASI	964.119.770.949,00	874.729.833.942,00	(89.389.937.007,00)	90,73
BELANJA MODAL	406.096.768.380,00	379.683.313.320,00	(26.413.455.060,00)	93,50
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.396.275.801,00	0,00	(1.396.275.801,00)	0,00
TRANSFER	21.779.609.257,00	21.424.605.836,00	(355.003.421,00)	98,37
PEMBIAYAAN	179.822.490.573,00	185.294.101.915,42	5.471.611.342,42	103,04
PENERIMAAN DAERAH	215.580.377.912,00	215.431.066.970,95	(149.310.941,05)	99,93
PENGELUARAN DAERAH	35.757.887.339,00	30.136.965.055,53	(5.620.922.283,47)	84,28

Sumber data: data diolah penulis

Alisis Deskriptif Kuantitatif

1. varians

a. Anggaran pendapatan

Anggaran pendapatan terdiri dari:

1) Pendapatan asli daerah

Rp 132.991.839.068,00 –Rp 149.352.694.369,65 =

Rp16.360.855.301,65

2) Pendapatan transfer

Rp 1.047.874.423.026,00 – Rp 1.058.503.881.033,72 =

Rp10.629.458.007,72

3) Lain- lain pendapatan yang sah

Rp 32.703.671.720,00 –Rp 32.703.671.720,00 =Rp0,00 .

Total anggaran pendapatan dan realisasinya adalah:

Rp1.213.569.933.814,00–Rp1.240.560.247.123,37 =

Rp26.990.313.309,37 .

Dari perhitungan diatas terlihat realisasi pendapatan lebih tinggi yaitu bertambah sebesar Rp26.990.313.309,37.Jumlah realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari pada yang telah dianggarkan sehingga anggaran tersebut dinilai sudah efektif.

b. Anggaran belanja

anggaran belanja terdiri dari:

1) Belanja operasional

Rp 964.119.770.949,00 –Rp 874.729.833.942,00 =

(Rp 89.389.937.007,00)

2) Belanja modal

Rp 406.096.768.380,00 – Rp 379.683.313.320,00 =

(Rp 26.413.455.060,00)

3) Belanja tak terduga

Rp 1.396.275.801,00 – Rp 0,00=(Rp 1.396.275.801,00)

Total anggaran belanja daerah dan realisasinya adalah:

Rp1.393.392.424.387,00-Rp1.275.837.753.098,00=

(Rp117.554.671.289,00)

Dari perhitungan diatas terlihat anggaran belanja lebih tinggi daripada realiasi sehingga berkurang sebesar (Rp117.554.671.289,00).

c. Anggaran pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari:

1). Penerimaan daerah

Rp215.580.377.912,00–Rp215.431.066.970,95 = (Rp149.310.941,05)

Penerimaan berkurang sebesar Rp149.310.941,05.

2). Pengeluaran daerah

Rp35.757.887.339,00–Rp30.136.965.055,53 =(Rp 5.620.922.283,47)

Jumlah anggaran pengeluaran lebih tinggi daripada realisasinya sehingga berkurang sebesar(Rp5.471.611.342,42). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pembiayaan T.A 2014 selisih kurang artinya belanja daerah mampu efisien.

Total pembiayaan adalah sebesar

Rp 179.822.490.573,00 – Rp 185.294.101.915,42 = Rp 5.471.611.342,42.

Hal ini menunjukkan anggaran pembiayaan selisih lebih sebesar Rp 5.471.611.342,42.

2. Rasio efektifitas

a. Pendapatan

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{1.240.560.247.123,37}{1.213.569.933.814,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = 102,22\%$$

Dari perhitungan rasio efektifitas pendapatan diatas terlihat bahwa jumlah realisasi anggaran lebih besar dari pada yang telah dianggarkan sehingga tercapai tingkat efektifitas sebesar 102,22%.

b. Belanja

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{1.275.837.753.098,00}{1.393.392.424.387,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = 91,56\%$$

Dari perhitunhan diatas terlihat realisasi anggaran belanja lebih kecil daripada yang telah dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kab.gowa mampu mengefisienkan belanja sebesar 91,56%.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$\text{RKKD} = \frac{149.352.694.369,65}{1.058.503.881.033,72} \times 100\%$$

$$\text{RKKD} = 14,109 \%$$

Dari perhitungan diatas terlihat pendapatan asli daerah lebih kecil dari pada pendapatan transfer. Artinya tingkat kemandirian keuangan daerah belum efektif. Rasio kemandirian keuangan daerah kab. Gowa T.A hanya mencapai 14,109 %.

Tabel. 5.3
Ringkasan varians pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah kab. Gowa
Tahun 2015

URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	VARIANS Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
PENDAPATAN – LRA	1.438.673.206.610,00	1.450.811.765.394,00	12.138.558.784,00	100,84
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.283.776.458,00	154.772.384.000,10	4.152.702.711,90	105,08
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.291.389.430.152,00	1.295.542.132.863,90	4.152.702.711,90	100,32
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	0,00	497.248.530,00	497.248.530,00	0,00
BELANJA	1.449.278.177.677,55	1.353.026.929.890,00	(96.251.247.787,55)	93,36
BELANJA OPERASI	1.035.284.775.401,40	967.229.767.637,00	(68.055.007.764,40)	93,43
BELANJA MODAL	413.981.286.389,30	385.797.162.253,00	(28.184.124.136,30)	93,19
BELANJA TAK TERDUGA	12.115.886,85	0,00	(12.115.886,85)	0,00
TRANSFER	120.067.679.555,04	119.094.004.465,06	(973.675.089,98)	99,19
PEMBIAYAAN	130.672.650.622,59	143.555.250.883,79	130.672.650.622,59	109,86
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	147.404.596.553,79	148.319.484.232,79	147.404.596.553,79	100,62
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.731.945.931,20	4.764.233.349,00	16.731.945.931,20	28,47

sumber data: data diolah penulis

Analisis deskriptif kuantitatif

1. varians

a. Anggaran pendapatan

Anggaran pendapatan terdiri dari:

1) Pendapatan asli daerah

Rp 147.283.776.458,00 -Rp 154.772.384.000,10=Rp 7.488.607.542,10

2) Pendapatan transfer

Rp 1.291.389.430.152,00 -Rp1.295.542.132.863,90 =

Rp 4.152.702.711,90

3) Lain-lain pendatan yang sah

Rp 0,00 – Rp 497.248.530,00 =Rp 497.248.530,00

Total anggaran pendapatan dan realisainya adalah:

Rp1.438.673.206.610,00–Rp1.450.811.765.394,00 =

Rp12.138.558.784,00.

Dari perhitungan diatas terlihat realisasi pendapatan lebih tinggi yaitu bertambah sebesar Rp12.138.558.784,00.jumlah pendapatan yang lebih tinggi dari pada yang telah dianggarkan menunjukkan bahwa Anggaran pendapatan T.A 2014 mampu terpenuhi dengan persentase 100,84%.

b. Anggaran belanja

Anggaran belanja terdiri dari:

1) Belanja operasional

Rp 1.035.284.775.401,40–Rp 967.229.767.637,00=
(Rp 68.055.007.764,40).

2) Belanja modal

Rp 413.981.286.389,30–Rp 385.797.162.253,00 =
(Rp 28.184.124.136,30).

3) Belanja tak terduga

Rp 12.115.886,85–Rp 0,00 =(Rp 12.115.886,85).

Total anggaran belanja dan realisasinya adalah:

Rp1.449.278.177.677,55–Rp1.353.026.929.890,00=
(RP 96.251.247.787,55)

Dari perhitungan diatas terlihat anggaran belanja lebih tinggi daripada realiasi sehingga berkurang sebesar (RP 96.251.247.787,55)Jumlah realisasi belanja daerah lebih rendah daripada yang telah dianggarkan

c. Anggaran pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan daerah

Rp147.404.596.553,79–Rp148.319.484.232,79= Rp914.887.679,00

Jumlah penerimaan lebih tinggi daripada jumlah yang dianggarkan dengan selisih Rp 914.887.679,00.

2) Pengeluaran daerah

Rp16.731.945.931,20–Rp4.764.233.349,00= (Rp 11.967.712.582,20)

jumlah anggaran lebih tinggi dari pada realisainya sehingga sehingga

pengeluaran berkurang sebesar (Rp 11.967.712.582,20) Jadi, total anggaran pembiayaan dan realisasinya adalah:

$$\text{Rp } 130.672.650.622,59 - \text{Rp } 143.555.250.883,79 = \text{Rp } 12.882.600.261,20$$

Jumlah anggaran pembiayaan lebih rendah daripada realisasinya sehingga bertambah sebesar Rp 12.882.600.261,20.

2. Rasio efektifitas

a. Pendapatan

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{154.772.384.000,10}{147.283.776.458,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = 105,08\%$$

Dari perhitungan rasio efektifitas pendapatan diatas terlihat bahwa jumlah realisasi anggaran lebih besar dari pada yang telah dianggarkan sehingga tercapai tingkat efektifitas sebesar 105,08%.

b. Belanja

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{1.353.026.929.890,00}{1.449.278.177.677,55} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = 93,36\%$$

Dari perhitunhan diatas terlihat realisasi anggaran belanja lebih kecil daripada yang telah dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kab.gowa mampu mengefisienkan belanja sebesar 93,36%.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$\text{RKKD} = \frac{154.772.384.000,10}{1.295.542.132.863,90} \times 100\%$$

$$\text{RKKD} = 11,946 \%$$

Dari perhitungan diatas terlihat pendapatan asli daerah lebih kecil dari pada pendapatan transfer. Artinya tingkat kemandirian keuangan daerah belum efektif. Rasio kemandirian keuangan daerah kab. Gowa T.A hanya mencapai 11,946 %.

Tabel 6

**Rasio Efektifitas Anggaran Pendapatan
Pemerintah Daerah Kab. Gowa T.A 2013-2015**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Analisis efektifitas
2013	1.064.035.897.036,00	1.085.477.701.555,65	102,02	Sangat efektif
2014	1.213.569.933.814,00	1.240.560.247.123,37	102,22	Sangat efektif
2015	1.438.673.206.610,00	1.450.811.765.394,00	100,84	Sangat efektif

Sumber: data diolah penulis

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kab. Gowa T.A 2013,2014, dan 2015 sangat efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan yaitu sebesar 102,02%, 102,22% dan 100,84%. Hal ini disebabkan realisasi anggaran pendapatan lebih besar dari target anggaran pendapatan.

Tabel 7
Rasio Efisiensi Anggaran Belanja
Pemerintah Daerah Kab. Gowa T.A 2013-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Analisis efektifitas
2013	1.192.611.129.390,30	1.033.366.710.707,00	86,65	Sangat Efisien
2014	1.393.392.424.387,00	1.275.837.753.098,00	91,56	Efisien
2015	1.449.278.177.677,55	1.353.026.929.890,00	93,36	Efisien

Sumber: data diolah penulis

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanjapemerintah daerah pada pemerintah daerah Kab. Gowa T.A 2014, dan 2015 dinilai efisien dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja yaitu sebesar 91,56% dan 93,36%. Sedangkan T.A 2013 dinilai sangat efisien karena dapat berhemat lebih besar dengan rasio efisiensi sebesar 86,65%. Hal ini disebabkan realisasi anggaran belanja lebih kecil dari target anggaran belanja sehingga instansi dapat berhemat dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 8
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Pemerintah Daerah Kab. Gowa T.A 2013-2015

Tahun	PAD(Rp)	Pendapatan transfer(Rp)	Persentase (%)	Analisis efektifitas
2013	109.772.063.453,36	940.633.467.102,29	11,67	Tidak efektif
2014	149.352.694.369,65	1.058.503.881.033,72	14,109	Tidak efektif
2015	154.772.384.000,10	1.295.542.132.863,90	11,946	Tidak efektif

Sumber: data diolah penulis

Dari tabel 8 diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah belum efektif untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan pada pemerintah daerah kab. Gowa.

D. Analisa Rasio

Anggaran berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Jika anggaran pendapatan lebih kecil dari pada realisasinya maka anggaran tersebut efektif sedangkan jika anggaran pendapatan lebih besar maka anggaran tersebut cukup efektif atau bahkan tidak efektif. Efektifitas Anggaran belanja berbanding terbalik dengan anggaran pendapatan yaitu jika anggaran belanja lebih besar dari pada realisasinya maka anggaran tersebut efektif. Sedangkan jika anggaran belanja lebih kecil dari pada realisasinya maka anggaran tersebut tidak efektif.

1. Rasio varians

Berdasarkan analisis varians (selisih) secara umum dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan mampu terpenuhi jauh lebih besar daripada target anggaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada dinas keuangan pemerintah Kab. Gowa berdasarkan pada laporan anggaran dan realisasi anggaran T.A

2013, T.A 2014, T.A 2015 menunjukkan rasio varians anggaran pendapatan bersaldo positif sebesar Rp 21.441.804.519,65, Rp 26.990.313,37 dan Rp 12.138.558.784,00.

Hasil analisis varians anggaran belanja dan realisasi T.A 2013, - T.A 2015 Menunjukkan angka yang bersaldo negative. Pada T.A 2013 menunjukkan angka sebesar (Rp 159.244.418.683,30), Pada T.A 2014 menunjukkan angka yang negatif sebesar (Rp 117.554.671.289,00) Pada T.A 2015 Anggaran belanja masih menunjukkan hasil negatif setelah varians sebesar (Rp 96.251.247.787,55) .

2. Rasio efektifitas

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektifitas anggaran pendapatan pada pemerintah daerah Kab. Gowa pada tahun 2013- 2015 dinilai sangat efektif dalam melakukan penegelolaan anggaran pendapatan yaitu sebesar 102,02%, 102,22% dan 100,84%. Tingkat efektifitas paling tinggi tercapai pada T.A 2014 dengan persentase sebesar 102,22%.

Hasil penelitian rasio efisiensi belanja pada pemerintah daerah kab.Gowa dinilai mampu efisien dalam mengelola anggaran belanja karena instansi tersebut mampu berhemat dalam menggunakan anggaran. Rasio efektifitas anggaran belanja T.A 2013, T.A 2014 dan T.A 2015 adalah 86,65%, 91,56% dan 93, 36%.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Berdasarkan hasil penelitian rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) pada pemerintah daerah kab.Gowa dinilai masih belum

efektif. Rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah kab. Gowa pada T.A 2013, 2014, dan 2015 adalah sebesar 11,67%, 14,109% dan 11,946%. Dilihat dari persentase rasio tersebut maka Kab.Gowa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dinilai belum mampu ditinjau dari aspek pendapatan asli daerahnya sebab masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah Kab.Gowa paling tinggi hanya mencapai 14,109%.

BAB VI

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa jika anggaran pendapatan lebih rendah daripada realisasi pendapatan maka akan menghasilkan varian (selisi) bertambah. Semakin besar realisasi pendapatan akan semakin tinggi efektifitasnya. Sedangkan anggaran belanja berbanding terbalik dengan anggaran pendapatan. Jika anggaran belanja lebih besar daripada realisasi maka instansi tersebut mampu mengefisienkan belanjanya.

Tingkat efektifitas anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah kab. Gowa.

1. Tahun anggaran 2013

Tingkat efektifitas anggaran pendapatan T.A 2013 sebesar 102,02% sangat efektif. tingkat efisiensi anggaran belanja pada pemerintah kab. Gowa sebesar 86,65%. Tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah kab. Gowa sebesar 11,67% tidak efektif.

2. Tahun anggaran 2014

Tingkat efektifitas anggaran pendapatan T.A sebesar 102,22% sangat efektif. tingkat efisiensi anggaran belanja pada pemerintah kab. Gowa sebesar 91,56% sangat efisien. Tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah kab. Gowa sebesar 14,109% tidak efektif.

3. Tahun anggaran 2015

Tingkat efektifitas anggaran pendapatan T.A sebesar 100,84% sangat efektif. tingkat efisiensi anggaran belanja pada pemerintah kab. Gowa sebesar 93,36 efisien. Tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah kab.Gowa sebesar 11,946% tidak efektif.

Tingkat kinerja pendapatan pada pemerintah kabupaten gowa secara umum dapat dikatakan sudah baik.Dan kinerja belanja dilihat dari analisis varians secara umum juga dapat dikatakan sudah baik.

B. Saran

1. Anggaran pendapatan

Adapun saran terhadap pemerintah kab.Gowa yaitu mempertahankan efektifitas yang telah dicapai. Dengan tingkat efektifitas anggaran pendapatan yang tinggi diharapkan menambah kinerja dalam proses penyusunan anggaran daerah.

2. Anggaran belanja

Pada penelitian ini kinerja belanja begitu efisien sehingga menghasilkan silpa yang tinggi.Dengan silpa yang tinggi pemerintah diharapkan untuk lebih memaksimalkan penggunaan anggaran untuk kinerja yang lebih baik.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Kemudian dari segi kemandirian keuangan daerah perlu ditingkatkan dengan cara menertibkan pajak dan retribusi dengan cara menyadarkan masyarakat untuk membayar kewajiban terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. dan A. Rohman. 2012. "PengaruhPartisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah:Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1.No. 2, hal.1-11.
- Anthony, R. N. dan V. Govindarajan. Diterjemahkan Oleh Drs. F.X. Kurniawan. Tjakrawala, (2009). *Sistem Pengendalian Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006 sistem akuntansi sektor publik. Edisi 2. Jakarta: salemba empat.
- DEPUTI IV BPKP. (2005). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: BPKP.
- Husin, R. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pimpinan dengan Desentralisasi, Budget Goal Commitment, dan Job-Relevant Information sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris di Pemerintah Kota Ternate).. Universitas Brawijaya. Malang.
- _____, R. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pimpinan dengan Desentralisasi, Budget Goal Commitment, dan Job-Relevant Information sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris di Pemerintah Kota Ternate). *Tesis tidak Dipublikasikan*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Hansen & Mowen. (2005). *Management Accounting*. Edisi ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). *Akuntansi Manajerial*. Edisi kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- LPPM Akunting 2005, *kursus manajemen multimedia*.
- L.M. Samryn. (2007). *Akuntansi Manajerial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2006. akuntansi sector publik. Yogyakarta: peerbit ANDI.
- Modul Kelas Reguler: *Perencanaan dan Penganggaran*. Edisi 05. PPAKP Kementerian Keuangan RI. Tahun 2012
- Mulyadi. (2008). *Akuntansi Manajemen*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011 tentang

Klasifikasi Anggaran

JURNAL:

Abidin Noor Izza Fityan 2011. *Pemahaman Atas Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.*

Arifin.W Beni, 2012. *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variable Pemoderasi.* Jurnal akuntansi dan investasi. Vol. 13 no. 1 hal.15-27.

Bakri, 2015. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Anggaran Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.* Al-Huhuts. Hal.167-184.

Langgen Setiyo Yogi dan Ratna Dwi Ending, 2014. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penelitian Kinerja Pusat Biaya.* Jurnal ilmu dan riset akuntansi vol. 3 No. 6.

Makka Dkk, 2015. *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Di Kota Mobagu.* Vol. 15 No. 04.

Mahfiza, 2015. *Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Gorontalo.* Vol.11 Hal.134-150.

Sugeha Dkk, 2015. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013.*

Saerang Elia Vaul David, Wokas Nicky Ruddy Heince, 2010. *Pengaruh Komitmen Dan Pendidikan Terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Sulawesi Utara.*

Sudaryanti Dwi, 2013. *Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat PEMDA Melalui Sistem Keuangan Pemerintah Daerah*

Yanida DKK., 2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah.* Jurnal Accounting Vol.11 No. 5 Hal.120-132.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rahmat hidayat, lahir di Kab.Gowa, Kec. Pallangga, Desa Julukanaya, Dusun cambaya pada 21 juni 1995. Anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari pasangan aripin dan hadijah. Penulis mulai menempuh jenjang pendidikan di sekolah taman kanak-kanak aisyah babussalam cambaya pada usia kurang lebih 5 tahun, yaitu pada tahun 2000-2001.

Pada tahun 2001-2007 penulis menempuh pendidikan di sekolah dasar negeri cambaya (SDN Cambaya). Pada tahun 2007-2010, penulis menempuh pendidikan di SMP sederajat yaitu MTS MUHAMMADIYAH JULUBORI. Kemudian setelah tamat sekolah di MTS Muhammadiyah julubori, penulis melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Limbung yaitu pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013.

Setelah tamat SMA, penulis mendaftarkan diri pada salah satu perguruan tinggi yang terletak di Jl. Sultan alauddin atau lebih dikenal dengan jl. Tala' salapang yaitu kampus biru UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR (UNISMUH MAKASSAR). Penulis mendaftarkan diri dengan 3 pilihan jurusan, yaitu pendidikan sejarah, akuntansi, dan agribisnis. Setelah seleksi, ternyata penulis lulu pada pilihan kedua yaitu jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Penulis berpikir, mungkin itu sudah tandir yang maha kuasa untuk melanjutkan pendidikan di kampus UNISMUH makassar dengan jurusan akuntansi Program Strata 1. Penulis aktif kuliah

perdana pada tahun 2013 dan Alhamdulillah menyelesaikan studinya pada awal bulan 2018 yaitu pada Tgl 12 februari 2018.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orangtua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “**Efektifitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kab. Gowa**”